

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia kasus kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi secara terus-menerus dan semakin berkembang. Umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang merugikan keuangan negara. Kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu di antara manajemen, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak-pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal (Hayes dkk, 2017). Secara umum, fraud mencakup beragam cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar (Ardianingsih, 2017:74). Ada juga istilah lain yang seringkali dipergunakan untuk menggambarkan suatu jenis *fraud*, yakni kejahatan kerah putih atau *white-collar crime* (Tuanakotta 2016:195). Menurut buku Islahuzzaman (2012:212) kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang yang pekerjaannya adalah wiraswasta, profesional, atau semi profesional dan yang memanfaatkan keahlian dan peluang yang diberikan oleh jabatannya, juga kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang

dilakukan dengan penipuan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dan pengetahuan profesional mengenai bisnis dan pemerintahan, meskipun ia tidak terkait dengan pekerjaannya. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) (dalam paranoan, 2018). Teori ini menyatakan bahwa kecurangan akuntansi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) kesempatan (*opportunity*), (2) tekanan (*pressure*), dan (3) rasionalisasi (*rationalization*). ACFE (Association of certified fraud examiners) mengategorikan kecurangan akuntansi ke dalam tiga bagian, yakni: (a) korupsi, (b) kecurangan laporan keuangan dan (c) penyalahgunaan aset.

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Hasil survei *Transparency International* menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di level 38 dari skala 0-100 pada 2018. Indeks mendekati 0 mengindikasikan masih terjadi banyak korupsi, sebaliknya makin mendekati 100 semakin bersih dari korupsi. Dengan skor tersebut Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 180 negara yang disurvei. Sumatera Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumut terdepan dari lima provinsi lain yang dinilai KPK tergolong paling korup ( Media

Indonesia/ 12 April 2019). Berikut ini daftar beberapa kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten/ Kota Sumatera utara tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1

Beberapa Kasus Korupsi yang Terjadi di Sumatera Utara pada Sektor Pemerintahan Tahun 2018 S/D Tahun 2020

No	Pelaku	Tahun	Kabupaten/ Kota	Keterangan
1	12 ASN di Asahan	2018	Asahan	Tindak Pidana Korupsi (Pontas id/ 04 juli 2018)
2	Bupati Nonaktif Kabupaten Batubara, OAZ	2018	Batubara	Korupsi senilai Rp.6,2 miliar yang berasal dari uang fee sejumlah proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Batubara di tahun 2016 dan 2017 lalu.( Oke News/ 02 April 2018)
3	Tujuh orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2019	Dairi	Tindak Pidana Korupsi (Tribun News/ 3 Januari 2019)
4	Kepala Desa (Kades) Sampali, Percut, Deli Serdang, Sumut SA	2019	Deli Serdang	Korupsi Rp 146 miliar terkait penerbitan surat keterangan tanah PTPN-II Tanjung Morawa.(Realita Rakyat/ 8 December 2019)
5	Empat Aparatur Sipil Negara (ASN)	2019	Karo	Tindak Pidana Korupsi (Tribun News/ 29 Januari 2019)
6	Bupati Labuhan Batu PH	2019	Labuhan Batu	Kasus Suap (Kompas/ 4 April 2019)

No	Pelaku	Tahun	Kabupaten/ Kota	Keterangan
7	5 Pejabat Pekab Labura dan Labusel	2020	Labuhan batu utara	Korupsi DBH dan PBB (Medan Bisnis/ 15 Jan 2020)
8	Camat Babalan YP dan Sekretaris Camat Babalan RM.	2020	Langkat	Kasus tindak pidana korupsi dan pemerasan dengan penerbitan Surat Rekomendasi Camat untuk pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Langkat.(Antara News/ 5 Februari 2020)
9	Plt Kadis Perkim Madina, RL (49); (PPK) Dinas Perkim Madina 2017, ED (42) AR (40).	2019	Mandailing Natal	Tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar di Dinas Perkim dan Rp2,8 miliar di Dinas PU dan Tata Ruang. Nilai itu sesuai hasil audit akuntan publik (Merdeka.com/14 Oktober 2019).
10	Kasubag Umum Bandar Udara Wilayah II Medan Kualanamu.	2019	Nias	Korupsi tahun anggaran 2016( Merdeka. Com/ 15 Oktober 2019).
11	Mantan Kades MGS di Padang Bolak	2019	Padang Lawas	Korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 (Sidak News / 26 November 2019).
12	Bupati Phakpak Barat RYB	2019	Phakpak Barat	Kasus Suap ( Sindo News 24 September 2019)

No	Pelaku	Tahun	Kabupaten/ Kota	Keterangan
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai AS	2018	Serdang Bedagai	Tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul (Merdeka.com/ 29 November 2018)
14	Kepala Dinas Koperindag Pemkab Tapanuli Selatan AS dan Kuasa Pengguna Anggaran N	2018	Tapanuli Selatan	Dugaan korupsi pembangunan pasar tradisional Situmbak, Sipirok, Tapanuli Selatan. senilai Rp 300 juta dari pembangunan pasar yang merogoh anggaran sekitar Rp 1,3 miliar pada APBD 2014. (Medan.tribunnews.com/ 30 Desember 2018).
15	Tiga orang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	2020	Tapanuli Tengah	Tindak pidana korupsi <i>mark up</i> atau penyimpangan biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tahun Anggaran (TA) 2016/2017 (CNN Indonesia/ 4 Desember 2018).
16	10 orang pegawai negeri sipil (PNS)	2020	Binjai	Penggelembungan harga (Mark up) hingga pengadaan fiktif alat peraga SD (Heta News/ 10 Februari 2020)
17	Wali Kota Medan Nonaktif, DE	2019	Medan	Dugaan kasus korupsi Perjalanan dinas ke Jepang (CNN Indonesia/ 2 November 2019)
18	5 ASN (AD,HD,RH, MH dan ZP) Kota Padangidimpuan	2019	Padangsidimpuan	Tindak pidana korupsi (Medam Bisnis/ 12 Jul 2019)
19	5 pejabat Pemko pematangsiantar	2019	Pematangsiantar	Tindak pidana korupsi (Idn Times/ 22 Juli 2019)

20	tujuh orang PNS	2019	Sibolga	Tindak pidana korupsi (Gatra.com/20 Mar 2019)
----	-----------------	------	---------	-----------------------------------------------

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa, kasus korupsi di Sumatera Utara hampir merata diseluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara tahun 2018 s/d tahun 2020 dan Pelaku korupsi didominasi oleh Aparatur Sipil Negara. Dari seluruh kasus, *mark up* atau penggelembungan anggaran menjadi modus yang paling sering digunakan untuk melakukan korupsi.

Kecurangan akuntansi lainnya adalah kecurangan laporan keuangan, menurut Islahuzzaman (2012) kecurangan laporan keuangan adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Salah satu contoh kasus yang mengindikasikan adanya masalah kecurangan laporan keuangan yaitu, pada tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Sumut. Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatakan, akibat masalah-masalah itu kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh beberapa daerah di Sumut menjadi berkurang. "BPK masih menemukan sejumlah masalah pada laporan keuangan masing-masing pemda," katanya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2017 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/5). Adapun masalah-masalah yang ditemukan antara lain, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tidak tetap tidak diyakini kebenarannya karena terdapat

perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung; aset disajikan dengan nilai Rp0,00; aset tidak didukung rincian yang memadai, tanah di bawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak diatribusikan ke aset tetap perolehan awal (Medan Bisnis /25 Mei 2018).

Bentuk lain dari kecurangan akuntansi adalah penyalahgunaan aset, menurut Tuanakotta (dalam Rendika, 2013) penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut. Hal tersebut terjadi karena ketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan sampai pelaporan, sehingga track record aset tersebut tidak dapat diketahui.

Salah satu penyebab terjadinya kecurangan akuntansi adalah karena lemahnya pengendalian internal di dalam suatu perusahaan atau organisasi, oleh sebab itu pengendalian internal yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Sesuai dengan hasil penelitian dari Fawji (2011) dan Rahmaida (2013) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* ), pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa

tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Fungsi pengendalian menjelaskan bahwa setelah sasaran ditentukan, rencana dirumuskan, pengaturan strukturnya ditetapkan (fungsi otorisasi) serta orang-orang dapat dipekerjakan, dilatih, dan diberikan motivasi, terdapat sejumlah evaluasi untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, para manajer harus memantau dan mengevaluai kinerja. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Ikhsan dkk, 2017:59)

Kelemahan pengendalian yang mengakibatkan Fraud dalam (ACFE.2016) menjelaskan, langkanya pengawasan Internal yang hanya 19,3 % dan mengesampingkan pengawasan internal 16,2 % mengakibatkan tindakan fraud ini dapat dilakukan. Padahal dalam survai fraud Indonesia pada poin media pendeteksian fraud, pengawasan internal yang notabene dilakukan oleh pihak auditor internal merupakan media efektif dalam pendeteksian sekaligus pencegahan fraud daripada sikap atasan yang tidak menjadi teladan yang mendapatkan 30,3% . Dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Gambar 1.1



### Persentase Kelemahan Pengendalian menurut ACFE 2016

Pengendalian yang efektif adalah pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilaluinya, tanpa menyimpang dari sistem yang dianut, sehingga tahapan yang dilaluinya benar (Amirullah, 2015:246). Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya pengendalian internal yang efektif memungkinkan terjadinya pengecekan silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain (Paranoan dkk, 2018). Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diterapkan untuk mencegah atau menemukan salah saji yang material atas laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian semua asersi yang terkait dengan semua akun serta pengungkapannya, termasuk mengevaluasi bagaimana transaksi diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan (Hery, 2011:88).

Kepuasan kompensasi juga dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi, hal ini sesuai dengan penelitian Gayatri dkk (2017) yang menemukan bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Rivai (2013) (dalam Sunaryo dkk, 2019) menjelaskan bahwa kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan, kompensasi

menjadi alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan. Dengan kompensasi yang sesuai, kecurangan akuntansi diharapkan dapat berkurang. Upah dan gaji merupakan kompensasi sebagai kontra prestasi atas pengorbanan pekerja, umumnya diberikan atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan maupun disetujui bersama berdasarkan personal kontrak (Wibowo, 2017:81) .

Nasution (2017) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dengan menggunakan variabel pengaruh keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut berhasil menemukan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Moralitas manajemen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Mengacu pada penelitian Nasution (2017), penelitian ini akan meneliti pengaruh keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel ketaatan aturan akuntansi ini berdasarkan pada penelitian Adelin (2013) yang menemukan bahwa ketaatan peraturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan adalah suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti atau dilakukan. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya. Dengan demikian ketaatan aturan akuntansi adalah kepatuhan dalam menaati pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, maka akan memberikan kesempatan terjadinya kecurangan akuntansi yang akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan. Suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi (Rahmaidha: 2016). Dalam konteks pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar menentukan kualitas laporan, dan dengan demikian, kegunaannya (Jonas dan Blanchet 2000) (dalam Young, 2015).

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk mengetahui Pengaruh Keefektifan Pengendalian internal, Kepuasan Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keefektifan Pengendalian internal, Kepuasan Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara)”**.

## 1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Pengendalian internal yang tidak efektif bisa menimbulkan kecurangan akuntansi.
2. Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan terjadi secara terus menerus.
3. Manipulasi data yang dilakukan oleh individu atau kelompok merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang dilakukan untuk menambah keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Kompensasi yang tidak sesuai yang diterima oleh pegawai bisa meimbulkan terjadinya kecurangan akuntansi, hal ini mengindikasikan ketidakpuasan pegawai terhadap imbalan yang diterima.
5. Masih banyak instansi pemerintahan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

## 1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini tidak meneliti semua faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Peneliti membatasi variabel yang akan diteliti pada variabel keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, ketaatan aturan

akuntansi karena beberapa kasus kecurangan akuntansi yang terjadi dipengaruhi oleh faktor tersebut.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Untuk mengetahui ketaatan aturan akuntansi manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis berupa pengaruh keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

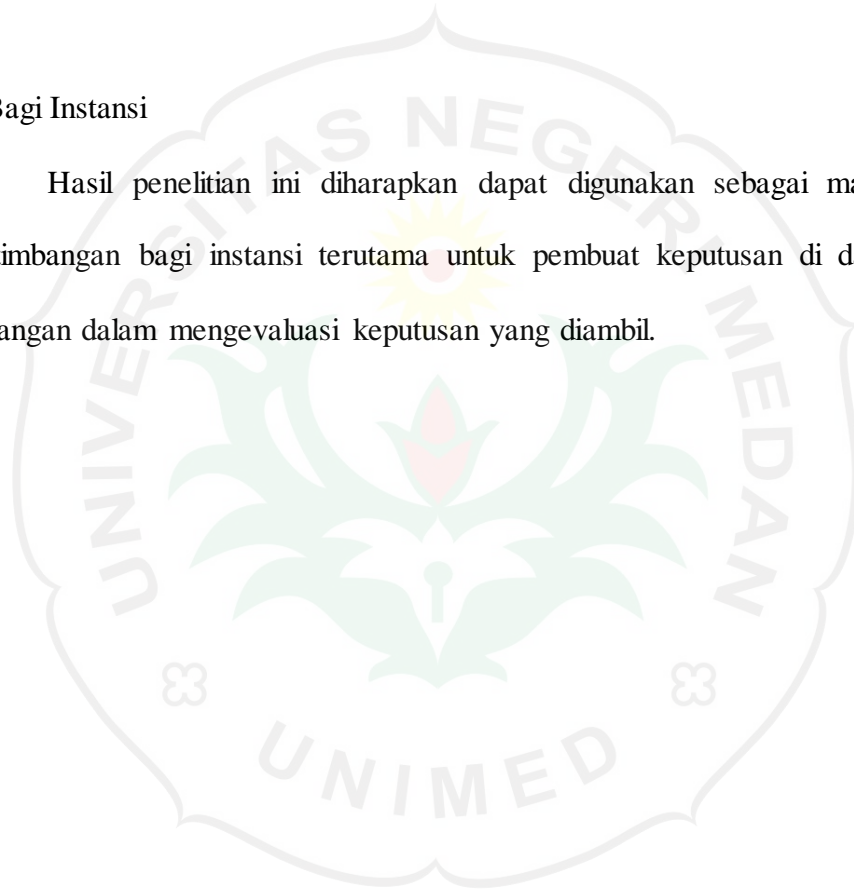
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk mempraktekkan teori yang diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi, dan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Medan.

##### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan referensi pustaka dan bermanfaat untuk peneitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan bagi instansi terutama untuk pembuat keputusan di dalam bidang keuangan dalam mengevaluasi keputusan yang diambil.



THE *Character Building*  
UNIVERSITY